

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH
PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT
TERHADAP PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DESA
DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR)**

Siti Evi Alfiah¹, Tubagus Rifqy Thantawi², Bayu Purnama Putra³

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

¹sitieviaalfiah16@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id,

³bayupurnamaputra@febi-inais.ac.id.

ABSTRACT

Socio-economic changes in the community during the COVID-19 pandemic resulted in a weakening of the economy in the community, one of the solutions provided by the government to deal with the socio-economic impact during the COVID-19 pandemic was non-cash food assistance. This study aims (1) to find out how the maqashid sharia perception of the village non-cash food assistance program during the covid-19 pandemic in the Pamijahan sub-district, Bogor district. (2) to find out how the community behaves towards the village non-cash food assistance program during the covid-19 pandemic in the Pamijahan sub-district, Bogor district. This type of research is by using quantitative research that uses a Likert scale, with a sample of 100 respondents. The sampling technique used was purposive sampling with the Tabachic & Fidell method. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis using the IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 25 Software. The results of this study indicate that the perception of maqasid sharia partially has no effect on the non-cash food assistance program. The behavior of the community partially has a significant effect on the non-cash food assistance program. Simultaneously, the perception variable of sharia maqashid and community behavior has a significant effect on the non-cash food assistance program.

Keywords: *Perception of Maqashid Syariah, Community Behavior and Non-Cash Food Assistance Program.*

ABSTRAK

Perubahan sosial ekonomi dimasyarakat dimasa pandemi Covid-19 mengakibatkan melemahnya perekonomian dimasyarakat, salahsatu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggapi dampak sosil ekonomi dimasa pandemi Covid-19 adalah Bantuan pangan non tunai. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana persepsi maqashid syariah terhadap program bantuan pangan non tunai desa di masa pandemi Covid-19 di kecamatan pamijahan kabupaten bogor. (2) untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai desa di masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan skala likert, dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode Tabachic & Fidell. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Software IBM Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh persepsi maqasid syariah secara parsial tidak berpengaruh terhadap program bantuan pangan non tunai. Perilaku masyarakat secara parsial berpengaruh nyata terhadap program bantuan pangan non tunai. Secara simultan variabel persepsi maqashid syariah dan perilaku masyarakat berpengaruh nyata terhadap program bantuan pangan non tunai.

Kata-kata kunci: Maqashid Syariah Persepsi, Perilaku Masyarakat dan Program Bantuan Pangan Non Tunai.

I. PENDAHULUAN.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-nya sebagai syariat Agama, tidak lain untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bisa berupakemanfaatan bagi manusia atau berupa penghindaran dari kemudharatan. Hal ini sebagai pendorong sekaligus menjadi tujuan dari penetapan hukum itu. Hal tersebut dinamakan juga hikmah hukum. Mislanya, seorang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, hikmahnya adalah untuk menghindari kemusyakatan atau kepayahan baginya. Diwajibkan *qishas* atas orang yang membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, hikmahnya adalah untuk memelihara jiwa manusia pada umumnya. Dengan hal ini ajaran Islam dengan konsep *Maqashid al-syari'ah* sangat mementingkan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:127), menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Maqashid al-syari'ah merupakan suatu teori hukum Islam yang cikal bakalnya sudah tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi'in*. walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu usul fiqh, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan. Tujuan dengan adanya *Maqashid al-syari'ah* adalah agar manusia mampu memanfaatkan harta duniawinya untuk menuju jalan yang baik dan menjadi kemaslahatan bagi seluruh umat.

Dimasa Pandemi COVID-19 saat ini, mengakibatkan adanya perubahan social ekonomi dimasyarakat secara umum khususnya masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat setelah adanya pandemic COVID-19 ini, banyak sekali berpengaruh terhadap segalanya apalagi terhadap kebutuhan hidup masyarakat karena melemahnya sistem ekonomi yang terjadi didalam masyarakat sehingga terjadi kemiskinan. Selain itu banyak pula pekerja yang di (PHK) sama dengan pemutusan hubungan kerja sehingga terjadipeningkatan pengangguran di Indonesia. Adapula dengan penerapan sistem PSBB yaitu pembatasan sosial bersekala besar yang dilakukan oleh pemerintah mampu menghambat sistem perekonomian masyarakat karena tidak boleh adanya kerumunan disuatu tempat. Dengan beberapa peraturan diatas dapat menyebabkan terjadinya penurunan ekonomi

atau kemiskinan dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa program penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, di antaranya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19. Pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhak menerima bantuan ini. Sebagian besar dari program-program ini merupakan program-program yang telah rutin dilakukan pemerintah. Terkait dengan COVID-19, pemerintah kemudian meningkatkan jumlah penerima bantuan dari program-program yang telah disebutkan sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya, 1996:5).

Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hambanya (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Misalnya, tentang

peran penyaluran program bantuan sebagai salah satu program pemerintah untuk menghentikan kemiskinan salah satunya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa ini bisa menjadi salah satu solusi yang efektif jika di jalankan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

II.2. Persepsi Masyarakat

Pada umumnya persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses perolehan, penafsiran, pemilihan serta pengaturan informasi. (Sarwono, 2009:32). Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-V adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan. Seseorang yang mengalami suatu proses untuk mengetahui beberapa hal dengan melalui panca inderanya dapat dikatakan sebagai persepsi.

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa persepsi masyarakat merupakan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap obyek tertentu, dalam hal ini kebijakan pemerintah melalui program pengentasan kemiskinan yang melibatkan mereka sebagai sasaran program penerima manfaat. Program pengentasan kemiskinan yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Persepsi masyarakat tersebut sedikit atau banyak akan mempengaruhi sikap dan tindakan mereka dalam merespon kebijakan pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Mengacu pada pemikiran Robbins (2003: 160-163), terkait tiga faktor yang mempengaruhi persepsi tentang Program Pengentasan Kemiskinan, maka dapat disajikan hasil analisis data seperti: 1) Faktor pelaku persepsi (Usia, pendidikan, dan penghasilan); 2) Faktor obyek yang dipersepsikan (jenis dan jumlah bantuan yang diterima, mekanisme pelaksanaan program, informasi yang diperoleh terkait program, dan kualitas layanan pendampingan); serta 3) Faktor kondisi (lama menerima bantuan).

II.3. Program BPNT dan PKH Desa di Masa Pandemi Covid-19

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan (Bappenas, 2017).

Untuk mewujudkan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sejalan dengan tujuannya, maka disusun Pedoman Pelaksanaan yang menguraikan bisnis proses dan tahapan pelaksanaan program, yang terdiri dari:

1. Koordinasi Persiapan Pelaksanaan;
2. Sosialisasi dan Edukasi;
3. Pendaftaran;
4. Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan; serta
5. Pengendalian dan Pengaduan.

Pedoman pelaksanaan ini juga digunakan sebagai tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis oleh pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan, dan pihak terkait lainnya.

Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disusun oleh

Kementerian atau Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Untuk itu, dalam kesempatan ini, terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai ini. Besar harapan, kiranya Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya serta dukungan dari berbagai pihak terkait untuk kelancaran program ini. Masukan, saran, dan kritik yang membangun masih kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkahlaku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Sarman, 2000). Pemerintah sebagai pemangku otoritas publik) dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang ada di ranah publik. Dan untuk itu dibutuhkan bukan hanya perumusan (rencana) program, tetapi juga implementasi program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atas tujuan yang diinginkan (Tachjan, 2006).

PKH adalah sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*), yakni program jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Keluarga miskin,

pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim-piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Kemensos, 2013).

III. METODE PENELITIAN.

III.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis pendekatan induktif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menitik beratkan pada pengukuran dan analisis hubungan sebab-akibat antara bermacam-macam variabel, bukan prosesnya, penyelidikan dipandang berada dalam kerangka bebas nilai (Hardani, Auliya, Andriani, Fardani, Ustiawaty, Utami, Sukmana, & Istiqomah, 2020).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran persepsi dan perilaku masyarakat terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) desa di masa pandemi COVID-19 dengan analisis Maqahid syariah.

III.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia. Dan dalam penelitian ini peneliti memberikan kuesioner kepada responden. Pengambilan data dengan kuesioner dilaksanakan pada bulan Juni 2021.

III.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menerima program bantuan pangan non tunai desa di masa pandemi COVID-19 yang berada di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) Desa.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel tidak menggunakan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono dalam Mukhsin, Mappigau, & Tenriawaru, 2017). Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan program bantuan pangan non tunai (BPNT) Desa di masa pandemi COVID-19 pada Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2009:118)

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan pendekatan *Tabachic & Fidell*. Pengambilan sampel dan gan teknik *Tabachic & Fidell* adalah jumlah variabel independen dikalikan dengan 10-25 (Ferdinand, 2006). Jumlah variabel independen dalam penelitian ini ada dua, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan berada pada kisaran 75-100.

III.4. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data atau fakta yang akurat (Setyawan, 2013). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber pengumpulan data penelitian yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono dalam Singestecia, Handoyo, & Isdaryanto, 2018). Dalam

penelitian ini peneliti memperoleh data langsung yang ditemui di lapangan yaitu peneliti memberikan kuesioner kepada masyarakat yang mendapatkan program Bantuan Langsung Non Tunai (BPNT) Desa di masa pandemi COVID-19 pada Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu sumber data penelitian yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber lainnya sebelum penelitian dilakukan (Herviani & Febriansyah, 2016). Dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data sekunder melalui kepustakaan berupa artikel, jurnal, hasil penelitian, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa dimasa Pandemi COVID-19.

1. *Bagaimana Persepsi masyarakat dan pengaruhnya terhadap Program bantuan pangan Non Tunai Desa dimasa Pandemi COVID-19.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabel persepsi tidak berpengaruh dan tidak nyata terhadap program bantuan pangan non tunai Desa dimasa Pandemi COVID-19, hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar $1,853 < t_{tabel}$ sebesar 1,984 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,067 > 0,05$. Hal ini dikarenakan faktor pemahaman terhadap Persepsi masyarakat di Kecamatan Pamijahan masih kurang, dalam penelitian ini responden yang diberi pernyataan belum mengetahui tentang persepsi, hal ini dikarenakan kurangnya

membaca atau berita baik di televisi maupun media lainnya. Selain itu ini diperkuat oleh hasil data responden masyarakat Kecamatan Pamijahan pada pendidikan terakhir yang paling banyak yaitu pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar 59 orang atau 59% dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebesar 26 orang atau 26%. Adapun tori pendukung dalam penelitian ini dimana pengetahuan menurut Hatta, merupakan sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman (Nurdin, 2004).

2. *Bagaimana Perilaku Masyarakat dan pengaruhnya terhadap Program bantuan pangan Non Tunai Desa dimasa Pandemi COVID-19.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabel Perilaku Masyarakat berpengaruh dan nyata terhadap Program bantuan pangan non tunai hal ini menunjukkan t_{hitung} sebesar $6,355 > t_{tabel}$ sebesar 1,984 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel perilaku masyarakat secara parsial atau terpisah berpengaruh dan nilai taraf signifikan untuk variabel perilaku masyarakat sebesar 0,000 atau kurang besar dari 0,05 dengan demikian keputusannya H_0 ditolak H_a diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan (nyata) perilaku masyarakat terhadap bantuan pangannon tunai.

3. *Bagaimana pengaruh persepsi dan perilaku masyarakat secara simultan terhadap program bantuan pangan non tunai desa dimasa pandemi COVID-19.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabel persepsi dan Perilaku Masyarakat secara simultan atau bersama-sama berpengaruh dan nyata terhadap Program bantuan pangan non tunai hal ini menunjukkan $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($30,649 > 3,94$) dengan nilai sig 0,000

< 0,05.

4. *Bagaimana analisis Maqashid al-syari'ah terhadap hasil pengolahan data persepsi dan perilaku masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai (BPNT) desa di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.*

Persepsi masyarakat merupakan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap objek tertentu. Persepsi terhadap objek tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor external, perasaan kemampuan berfikir dan pengalaman yang dimiliki individu dapat menghasilkan persepsi yang berbeda tentang suatu objek.

Perilaku masyarakat merupakan respon atau reaksi terhadap stimulus dari luar, respon sangat tergantung pada karakteristik individu ataupun faktor-faktor lain dari individu yang bersangkutan. Respon individu terhadap stimulus dari luar dapat bersifat positif maupun negatif baik sadar ataupun tidak sadar hal ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi disaat individu tersebut mendapatkan stimulus dari luar. Berkaitan dengan persepsi dan perilaku masyarakat kecamatan pamijahan terhadap bantuan pangan non tunai dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat terhadap bantuan pangan non tunai didasarkan kepada pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang bantuan pangan non tunai dan pengetahuan tentang nilai-nilai syariah yang terkandung dalam program bantuan tersebut. Masyarakat pamijahan menganggap bantuan pangan non tunai merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai pelindung bagi setiap warga negara untuk

menjamin kelangsungan hidup warga Negara dimasa pandemi COVID-19, berdasarkan pengetahuan tentang hal ini pada akhirnya masyarakat memiliki pandangan bahwa kelangsungan hidup merupakan setiap hak, kelangsungan hidup yang pada akhirnya warga pamijahan memiliki kepedulian terhadap warga lainnya hal ini mencerminkan program bantuan pangan non tunai yang digulirkan dimasa pandemi COVID-19 sesuai dengan nilai syariat Islam. Program bantuan pangan non tunai dikecamatan pamijahan dirasakan belum merata artinya tidak semua warga Negara yang membutuhkan mendapatkan bantuan tersebut, akan tetapi masyarakat pamijahan yang memiliki kepedulian akan penderitaan orang lain dapat menolong warga yang tidak mendapatkan bantuan. Sikap tolong menolong merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dari rasa kemanusiaan. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap program bantuan pangan non tunai dilihat dari sisi *Maqashid al-syari'ah* sudah sesuai akan tetapi pendistribusian bantuan pangan non tunai yang belum merata mengakibatkan masih ada masyarakat yang belum dapat merasakan kemaslahatan dari bantuan tersebut, hal inilah yang menyebabkan hasil penelitian menyatakan persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap bantuan pangan non tunai.

- b. Perilaku masyarakat Kecamatan Pamijahan terhadap bantuan pangan non tunai sangatlah baik

hal ini di dukung dengan pengetahuan masyarakat tentang informasi bantuan pangan non tunai karna informasi sangat mudah didapatkan masyarakat akan tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya bantuan pangan nontunai yang dikarnakan belum meratanya informasi yang diberikan petugas terkait. Belum meratanya informasi mengakibatkan kekecewaan di masyarakat karna menganggap belum maksimalnya petugas penyalur bantuan pangan non tunai. Masyarakat kecamatan pamijaan sangat antusias terhadap program bantuan pangan non tunai karna dapat meringankan beban hidup dimasa pandemi COVID-19 terutama meringankan kebutuhan rumah tangga. Belum meratanya informasi mengakibatkan masih terjadinya ketidak sesuaian antara apa yang di rasakan masyarakat dengan apa yang didapatkan masyarakat.

- c. Berdasarkan pengetahuan dan perasaan masyarakat terkait bantuan pangan non tunai mengakibatkan respon masyarakat yang baik terhadap informasi bantuan pangan non tunai dengan ditandai masyarakat mengikuti prosedur penerimaan bantuan pangan non tunai baik dari sisi persyaratan maupun mekanisme penyaluran bantuan. Program bantuan pangan nontunai yang digulirkan pemerintah tepat guna karna masyarakat sedang menghadapi kesulitan hidup dengan diberikan bantuan pangan non tunai dapat meringankan hidup masyarakat dimasa

pandemi COVID-19.

- d. Pandemi COVID-19 merubah perilaku masyarakat terhadap program bantuan pemerintah karena masyarakat sedang menghadapi kesulitan kebutuhan hidup yang pada akhirnya masyarakat mengikuti prosedur dan mekanisme penyaluran bantuan pangan non tunai hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menyatakan perilaku masyarakat berpengaruh terhadap bantuan pangan non tunai dimasa pandemic COVID-19.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis *Maqashid al-syari'ah* Persepsi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bantuan Non Tunai Desa di masa Pandemi COVID-19” yang dilakukan, penulis menyimpulkan:

1. Secara parsial Persepsi tidak berpengaruh terhadap Bantuan Pangan Non Tunai Desa, hal ini ditunjukkan dengan t_{hitung} sebesar $1,853 < t_{tabel}$ sebesar $1,984$ dan tingkat signifikansinya sebesar $0,067 > 0,05$. Dikarenakan karakteristik responden dalam penelitian ini berada di tingkat pendidikan terakhir SD sampai SMP sebesar 85%, hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang persepsi. Sedangkan untuk Perilaku Masyarakat secara parsial berpengaruh dan nyata terhadap Bantuan Pangan Non Tunai Desa. Secara simultan hal ini menunjukkan bahwa variable Persepsi dan Perilaku Masyarakat berpengaruh positif dan nyata terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai Desa. Hal ini dikarenakan variabel Persepsi hasil parsialnya menunjukkan tidak berpengaruh karena nilai signifikansi dari variabel Perilaku Masyarakat cenderung lebih besar, sehingga nilai variabel

- Persepsi menjadi berpengaruh saat dihasil ujisimultan.
2. Persepsi masyarakat dilihat dari Perilaku Masyarakat di kecamatan Pamijahan terhadap Program Bnantuan Pangan Non Tunai Desa berpengaruh dan nyata, hal ini menunjukkan thitung sebesar $6,355 > t_{tabel}$ sebesar 1,984 dan tingkat signifikansinya sebesar $0,000 < 0,05$. Serta variabel ini cukup berarti secara langsung sebesar 28,8% dan sisanya 61,2% di pengaruhi oleh variabel lain.
 3. Terdapat pengaruh persepsi dan perilaku masyarakat secara simultan terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) desa di masa pandemi COVID 19 ditunjukkan dengan hasil penelitian di atas yaitu $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($30,649 > 3,94$) dengan nilai sig $0,000 < 0,05$.
 4. Hasil dari pengolahan data diatas mengenai pengolahan data persepsi dan perilaku masyarakat terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) desa di masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor persepsi terhadap objek tertentu dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor external, perasaan kemampuan berfikir dan pengalaman yang dimiliki individu dapat menghasilkan persepsi yang berbeda tentang suatu objek sangat tergantung pada karakteristik individu ataupun faktor-faktor lain dari individu yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Achmadi umar, F. (2013). *Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, W. (1986). *Ushul fiqih*. Beirut. Indonesia, T. B. (2008). *Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Jaya, A. (1996). *Konsep Maqashid Syariah Menurut ash-Shatibi*. Jakarta.
- Khallaf, A. a.-W. (1986). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo.
- Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan Masyarakat Ilmu & Seni*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurdin, M. (2004). *Kiat Menjadi Guru Profesional*. Yogyakarta: Prismashopie.
- Puspa Swara, R. M. (2010). *Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Tahun 1981-2007*. Jakarta.
- Rakhmat, J. (2007). *Psikologi Komunikasi : Edisi Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Robbins, S. P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Index Kelompok Gramedia.
- Sarman, M. &. (2000). *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*.
- Sarwono, S. W. (2009). *Psikologi Sosisal*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Soekanto, S. (1986). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.
- Toha, M. (2007). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, K. (2001). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman Setiadi, E. M. (2013). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenadamedia.
- Walgito, B. (2002). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Offset.